

Tujuan : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat

Sasaran :

a. Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan

Indikator : Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti

Formulasi :

$$\frac{\text{Jumlah Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi}} \times 100\%$$

Penjelasan :

Fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti adalah Jumlah Seluruh Aktivitas Fasilitasi dan Koordinasi yang menghasilkan output aktivitas sesuai kewenangan Kecamatan.

Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi adalah Jumlah Seluruh Aktivitas Fasilitasi dan Koordinasi yang dilakukan Kecamatan sesuai kewenangan Kecamatan.

#### 1. JENIS FASILITASI :

NO.	JENIS FASILITASI	URAIAN AKTIVITAS FASILITASI	OUTPUT AKTIVITAS	BUKTI PENDUKUNG
1	2	4	3	5
1.	Fasilitasi evaluasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes Kewenangan Desa;</li><li>2. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes RPJMDes;</li><li>3. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes Perubahan RPJMDes;</li><li>4. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes RKPDes;</li><li>5. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes Perubahan RKPDes;</li><li>6. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Raperdes APBDes;</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perdes Kewenangan Desa;</li><li>2. Perdes RPJMDes;</li><li>3. Perdes Perubahan RPJMDes;</li><li>4. Perdes RKPDes;</li><li>5. Perdes Perubahan RKPDes;</li><li>6. Raperdes APBDes;</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rapat koordinasi</li><li>2. Dokumen/Laporan,</li><li>3. SK Camat,</li><li>4. Rekomendasi,</li><li>5. Berita Acara hasil fasilitasi dan koordinasi yang menjadi kewenangan Kecamatan</li></ol>

NO.	JENIS FASILITASI	URAIAN AKTIVITAS FASILITASI	OUTPUT AKTIVITAS	BUKTI PENDUKUNG
1	2	4	3	5
		7. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Raperdes Perubahan APBDes; 8. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes SOTK Desa; 9. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes TKD; 10. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes LKD; 11. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes BUMDes; 12. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes Penyertaan modal BUMDes	7. Raperdes Perubahan APBDes; 8. Perdes SOTK Desa; 9. Perdes TKD; 10. Perdes LKD; 11. Perdes BUMDes 12. Perdes Penyertaan modal BUMDes	
2.	Fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa	1. Fasilitasi pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan Desa; 2. Fasilitasi pembinaan Administrasi Penduduk; 3. Fasilitasi pembinaan Adminiatrasi Keuangan;	1. Administrasi Umum; a. Data Perangkat Desa b. Buku Perdes c. Buku SK 2. Administrasi Penduduk; a. Buku Induk Penduduk b. Buku Mutasi Penduduk 3. Administrasi Keuangan; a. Buku APBDes b. Buku RAB	

NO.	JENIS FASILITASI	URAIAN AKTIVITAS FASILITASI	OUTPUT AKTIVITAS	BUKTI PENDUKUNG
1	2	4	3	5
		4. Fasilitasi pembinaan Administrasi Pembangunan;  5. Fasilitasi pembinaan Administrasi Lainnya.	4. Administrasi Pembangunan; a. Buku Kegiatan Pembangunan  5. Administrasi Lainnya. a. Buku Administrasi BPD b. Buku Administrasi LPMD	
3.	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	1. Fasilitasi pembinaan Perencanaan (APBDes & Penjabaran APBDes)  2. Fasilitasi Pembinaan Pelaksanaan Keuangan Desa (DPA & RAK)  3. Fasilitasi Pembinaan Penatausahaan Keuangan Desa  4. Fasilitasi Pembinaan dalam Pelaporan Keuangan Desa (Lap. Semester 1 & Lap. Akhir Tahun)  5. Fasilitasi Pembinaan Pertanggungjawaban (Perdes LPJ Realisasi APBDes)	1. Terlaksananya pembinaan Perencanaan (APBDes & Penjabaran APBDes)  2. Terlaksananya pembinaan Keuangan Desa (DPA & RAK)  3. Terlaksananya pembinaan Penatausahaan Keuangan Desa  4. Terlaksananya pembinaan Pelaporan Keuangan Desa (Lap. Semester 1 & Lap. Akhir Tahun)  5. Terlaksananya pembinaan Pertanggungjawaban (Perdes LPJ Realisasi APBDes)	
4.	Fasilitasi penerapan dan penegakan	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan	

NO.	JENIS FASILITASI	URAIAN AKTIVITAS FASILITASI	OUTPUT AKTIVITAS	BUKTI PENDUKUNG
1	2	4	3	5
	peraturan perundang-undangan	yang terkait dengan desa	Perundang-undangan yang terkait dengan desa	
5.	Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa	Pembinaan dan Pengawasan Tupoksi Kades dan Perangkat Desa	Pembinaan dan Pengawasan Tupoksi Kades dan Perangkat Desa yang terlaksana	
6.	Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pilkades	Pembentukan Panitia Pilkades dan tersedianya Berkas administrasi Pilkades :BA Panwascam	
7.	Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Tupoksi BPD	Pembinaan dan Pengawasan Tupoksi BPD yang terlaksana	
8.	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan dalam Musdes;</li> <li>2. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Musrenbangdes;</li> <li>3. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Musrenbangcam</li> <li>4. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Penyusunan RPJMDes</li> <li>5. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Penyusunan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. BA Musdes yang tersedia</li> <li>2. BA Musrenbangdes yang tersedia</li> <li>3. BA Musrenbangcam yang tersedia</li> <li>4. Dokumen RPJMDes yang tersedia</li> <li>5. Dokumen Perubahan RPJMDes yang tersedia</li> <li>6. Dokumen RKPDes yang tersedia</li> </ol>	

NO.	JENIS FASILITASI	URAIAN AKTIVITAS FASILITASI	OUTPUT AKTIVITAS	BUKTI PENDUKUNG
1	2	4	3	5
		Perubahan RPJMDes 6. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Penyusunan RKPDes 7. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Penyusunan Perubahan RKPDes	7. Dokumen Perubahan RKPDes yang tersedia	
9.	Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan	Sosialisasi Perbup 25 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa	Sosialisasi Perbup 25 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa yang terlaksana (surat undangan sosialisasi)	
10.	Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	1. Pembinaan LINMAS 2. Pembinaan SKD 2. Monev Trantibum	3. LINMAS terbina 4. SKD terbina 5. Monev Trantibum terlaksana	
11.	Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	Pembinaan dan Pengawasan Tupoksi LPMD	Laporan Pembinaan dan Pengawasan Tupoksi LPMD	
12.	Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	1. Fasilitasi Musdes yang partisipatif; 2. Fasilitasi Musrenbangdes yang partisipatif; 3. Fasilitasi Musrenbangcam yang partisipatif 4. Fasilitasi Penyusunan	1. Daftar Hadir Musdes yang tersedia; 2. Daftar Hadir Musrenbangdes yang tersedia; 3. Daftar Hadir Musrenbangcam yang tersedia;	

NO.	JENIS FASILITASI	URAIAN AKTIVITAS FASILITASI	OUTPUT AKTIVITAS	BUKTI PENDUKUNG
1	2	4	3	5
		RPJMDes yang partisipatif  5. Fasilitasi Penyusunan Perubahan RPJMDes yang partisipatif;  6. Fasilitasi Penyusunan RKPDes partisipatif  7. Fasilitasi Penyusunan Perubahan RKPDes yang partisipatif	4. Daftar Hadir Penyusunan RPJMDes  5. Daftar Hadir Penyusunan Perubahan RPJMDes  6. Daftar Hadir Penyusunan RKPDes  7. Daftar Hadir Penyusunan Perubahan RKPDes	
13.	Fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga	Pembinaan BKAD	Laporan Pembinaan BKAD yang tersedia	
14.	Fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa	Sosialisasi Pertanahan (Data Batas Desa)	Laporan Sosialisasi Pertanahan (Data Batas Desa) yang tersedia	
15.	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa (PKK, Posyandu Gerbangmas, BUMDes,	1. Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Musrenbangdes;	1. BA Musrenbangdes yang tersedia	

NO.	JENIS FASILITASI	URAIAN AKTIVITAS FASILITASI	OUTPUT AKTIVITAS	BUKTI PENDUKUNG
1	2	4	3	5
	KIMDesa, Kepemudaan, Keagamaan, Musrenbangcam, Penyaluran Bansos)	2. Fasilitas penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Musrenbangcam 3. Fasilitas penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Penyusunan RPJMDes 4. Fasilitas penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Perubahan RPJMDesa 5. Fasilitas penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Penyusunan RKPDes 6. Fasilitas penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Penyusunan Perubahan RKPDes	2. BA Musrenbangcam yang tersedia 3. Dokumen RPJMDes yang tersedia 4. Perubahan RPJMDes 5. RKPDes 6. Perubahan RKPDes	
16	Fasilitas Administrasi Kependudukan	1. Fasilitas Penyaluran Santunan Kematian 2. Fasilitas Sosialisasi Pelayanan Publik	1. Santunan Kematian yang tersalurkan 2. Sosialisasi Pelayanan Publik yang terlaksana	

NO.	JENIS FASILITASI	URAIAN AKTIVITAS FASILITASI	OUTPUT AKTIVITAS	BUKTI PENDUKUNG
1	2	4	3	5
17	Fasilitasi Umum dan Kepegawaian	1. Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian	2. Laporan Pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian yang tersedia	
18	Fasilitasi Keuangan	1. Fasilitasi penyusunan Laporan Perencanaan dan Kinerja 2. Fasilitasi penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 3. Fasilitasi penyusunan Laporan Keuangan 4. Fasilitasi penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	1. Laporan Perencanaan dan Kinerja yang tersedia 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang tersedia 3. Laporan Keuangan yang tersedia 4. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang tersedia	

## 2. JENIS KOORDINASI :

NO.	JENIS KOORDINASI	URAIAN KOORDINASI	OUTPUT AKTIVITAS	BUKTI PENDUKUNG
1	2	3	4	5
1.	Koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan	Koordinasi Pendampingan Desa	Terlaksananya Rapat Koordinasi dengan seluruh Pendamping	
2.	Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya	Koordinasi dalam penyelenggaraan Musdes dan Musrenbangdes;	Daftar Usulan RKPDes yang tersedia	

## 3. JENIS REKOMENDASI :

NO.	JENIS REKOMENDASI	URAIAN REKOMENDASI	OUTPUT AKTIVITAS	BUKTI PENDUKUNG
1	2	3	4	5
1.	Rekomendasi pengangkatan dan	Fasilitasi Rekomendasi	Rekomendasi pengangkatan dan	

	pemberhentian perangkat Desa	pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa	pemberhentian perangkat Desa yang diterbitkan	
--	------------------------------	---	---	--

b. Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa

Indikator : Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu

Formulasi :

$$\frac{(\text{Jumlah desa yang menyusun RKPDesa tepat waktu} + \text{Jumlah desa yang menyusun APBDesa tepat waktu} + \text{Jumlah desa yang menyusun LPPDesa tepat waktu})}{\text{Jumlah seluruh desa di wilayah kecamatan} \times 3 \text{ Dokumen administrasi pemerintahan desa}}$$

Penjelasan :

- Yang dimaksud dokumen administrasi pemerintahan desa pada definisi ini adalah RKPDesa, APBDesa, LPPDesa yang disusun tepat waktu.
  1. RKP dikatakan tepat waktu, ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September.
  2. APBDesa dikatakan tepat waktu, ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
  3. LPPDesa dikatakan tepat waktu, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat secara tertulis paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.